

## **Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)**

**Shita Unjaswati Ekawarna**

Inspektorat Kabupaten Merangin

*e-mail korespondensi: c.tha.only@gmail.com*

### **Abstract.**

This research aims to compare the fiscal capacity between the main districts and new autonomy districts in Jambi Province, determine whether the Revenue-Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) from the central government and Local Revenue (PAD), affects Regional Expenditures and to detects the flypaper effect. Estimates done by using panel data regression. The analysis showed that the contribution and the composition of the sources of PAD to PAD reception, both in the area of the main and new autonomy districts is still relatively low. But the main districts have a better ability to explore the sources of PAD compared to the new autonomy districts. Equalization funds had a higher contribution in financing regional expenditure in main and new autonomy districts. The allocation of regional expenditure in main and new autonomy districts have increased each year, but most of the regional expenditure was allocated to operating expenditures. The regression results indicate that main and new autonomy districts, there is simultaneously a significant influence between the variables of PAD, DBH, DAU and DAK to variable regional expenditure. However partial, variable PAD and DAU have a significant effect on regional expenditures, while variable DBH and DAK has no significant effect on regional expenditures. The flypaper effect are not found on the main and new autonomy districts in Jambi Province.

---

*Keywords : Revenue-Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), Local Revenue (PAD), Regional Expenditure, Flypaper Effect.*

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kemampuan keuangan daerah antara kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta untuk mendeteksi terjadinya flypaper effect. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi dan komposisi sumber-sumber PAD terhadap penerimaan PAD, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran masih tergolong rendah. Namun daerah induk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali sumber-sumber PAD dibandingkan dengan daerah pemekaran. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran. Alokasi belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran mengalami

peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar anggaran belanja daerah masih dialokasikan untuk belanja operasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa pada daerah induk dan pemekaran, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Namun secara parsial, variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DBH dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Tidak terjadi flypaper effect pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi.

*Kata kunci : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Flypaper Effect.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan model sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga bermuara pada keinginan daerah untuk memekarkan wilayahnya. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administratif, saat ini di Provinsi Jambi terdapat 9 kabupaten dan 2 kota. Tabel 1.1 berikut ini menyajikan informasi mengenai kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran daerah di Provinsi Jambi.

**Tabel 1. kabupaten/kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah di Provinsi Jambi**

kabupaten/kota Sebelum Pemekaran	kabupaten/kota Setelah Pemekaran		Tahun Pemekaran
	Daerah Induk	Daerah Pemekaran	
Batanghari	Batanghari	Muaro Jambi	1999
Sarolangun Bangko	Merangin	Sarolangun	1999
Bungo Tebo	Bungo	Tebo	1999
Tanjung Jabung	Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Timur	1999
Kerinci	Kerinci	Kota Sungai Penuh	2008
Kota Jambi	-	-	-

Salah satu yang menjadi alasan pemekaran kabupaten/kota tersebut adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintahan sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu pembiayaan yang disebut dengan belanja daerah. Untuk membiayai belanja daerah, sumber dana utama Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dikarenakan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah, maka kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana transfer (dalam penelitian ini dana transfer yang dimaksud adalah dana perimbangan) yang terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. Ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer (dana perimbangan) daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*. *Flypaper Effect* merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. *Flypaper effect* itu sendiri merupakan respon yang asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

*Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri (Sukriy dan Halim 2004; Maimunah 2006). Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja Pemerintah Daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi (*governance*) terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan pemerintahannya. Hal ini berarti Pemerintah Daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri daripada uang yang diterima dari pusat. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perilaku fiskal Pemerintah Daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer.

Asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila: a) Pengaruh (nilai koefisien) DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh (nilai koefisien) PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan; b) Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) kontribusi dan komposisi sumber-sumber PAD terhadap penerimaan PAD pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (2) kemampuan daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menggali sumber-sumber PAD untuk membiayai belanja daerahnya; (3) peran dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (4) alokasi belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (5) pengaruh PAD dan dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) terhadap belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi (6) fenomena *flypaper effect* pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* yaitu data Tahun 2010 – Tahun 2014 dan data *cross section* yaitu data 5 (lima) daerah induk dan 5 (lima) daerah pemekaran kabupaten/kota

di Provinsi Jambi, yang terdiri dari: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh. Data bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diperoleh dari situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode analisis data, yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi data panel. Formulasi regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD_{itx} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{itx} + \beta_2 DBH_{itx} + \beta_3 DAU_{itx} + \beta_4 DAK_{itx} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

$$BD_{ity} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{ity} + \beta_2 DBH_{ity} + \beta_3 DAU_{ity} + \beta_4 DAK_{ity} + e_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- BD : Belanja Daerah
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- i : *Cross-section*
- t : *Time series*
- $\beta_0$  : Intersep/konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi
- e : *Error term*
- x : Daerah Induk
- y : Daerah Pemekaran

Model regresi dengan menggunakan data panel secara umum mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai 3 (tiga) kemungkinan, yaitu residual *time series*, *cross-section* maupun gabungan *time series* dan *cross-section*. Maka terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam regresi data panel ini, yaitu:

**Metode Commom-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)**

Metode PLS juga dikenal sebagai *Common Effect Model (CEM)*. Pada metode ini, model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama dan *slope* koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross-section* (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu).

**Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)**

*Fixed effect* (efek tetap) dalam hal ini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula halnya dengan koefisien regresi yang memiliki besaran yang tetap dari waktu ke waktu. Dalam membedakan intersepnnya dapat digunakan peubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

**Metode Random Effect (Random Effect Models/REM)**

Dalam menganalisis regresi data panel, selain menggunakan metode FEM, analisis regresi dapat pula menggunakan metode REM. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode FEM yang menggunakan variabel semu (*dummy variable*), sehingga akibatnya model mengalami ketidakpastian.

Dari ketiga model tersebut, selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel. Digunakan 2 (dua) pengujian, yaitu:

**Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model PLS, dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *restricted F-Test*. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$  : Model PLS (*Restricted*)

$H_1$  : Model FEM (*Unrestricted*)

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol ( $H_0$ ) tersebut adalah dengan menggunakan F-statistik. Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu jika nilai F-test atau *Chow Statistik* (F-statistik) hasil pengujian lebih besar dari Ftabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah FEM.

### Uji Hausman

Setelah uji Chow dilakukan lalu dilanjutkan dengan Uji Hausman. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik daripada model REM. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$  : Model REM

$H_1$  : Model FEM

Dasar penolakan hipotesa nol ( $H_0$ ) adalah dengan menggunakan pertimbangan *Chi-Square* statistik. Jika *Chi-Square* statistik > *Chi-Square* tabel maka  $H_0$  ditolak (model yang digunakan adalah FEM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Sumber-Sumber PAD Terhadap Penerimaan PAD

Sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara sumber pendapatan daerah tersebut, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada PAD, mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Tabel-tabel 2 – 5 berikut ini menyajikan rincian kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total penerimaan PAD pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013.

**Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

kabupaten/kota	Kontribusi Pajak terhadap PAD (%)					Rerata Kontribusi Daerah (%)	Rerata Perkembangan Kontribusi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	18,25	19,35	21,55	21,09	25,73	21,19	9,32
Merangin	14,96	17,94	18,33	25,61	27,50	20,87	17,29
Bungo	14,31	13,16	15,54	15,99	22,88	16,38	14,01
Tanjung Jabung Barat	14,59	14,52	20,82	17,89	22,15	18,00	13,16
Kerinci	20,69	15,30	11,32	19,25	16,18	16,55	0,51
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>16,56</b>	<b>16,05</b>	<b>17,51</b>	<b>19,97</b>	<b>22,89</b>	<b>18,60</b>	<b>8,67</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	19,76	25,35	40,47	43,39	44,46	34,68	24,41
Sarolangun	16,79	19,40	15,50	25,66	32,45	21,96	21,87
Tebo	19,65	20,22	27,19	24,07	21,43	22,51	3,74
Tanjung Jabung Timur	10,48	9,05	11,55	21,01	28,15	16,05	32,47
Kota Sungai Penuh	11,29	28,69	19,57	21,34	18,41	19,86	29,41
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>15,59</b>	<b>20,54</b>	<b>22,86</b>	<b>27,09</b>	<b>28,98</b>	<b>23,01</b>	<b>17,13</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 2 menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih tergolong kecil. Rerata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada daerah induk dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 18,06% dengan rerata perkembangannya sebesar 8,67%. Selanjutnya, rerata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada daerah pemekaran adalah sebesar 23,01%, dengan perkembangannya sebesar 17,13%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada daerah induk lebih rendah bila dibandingkan dengan kontribusi pada daerah pemekaran.

Selanjutnya Tabel 3. menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada daerah induk dan pemekaran berfluktuasi setiap tahunnya. Rerata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada daerah induk dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 23,43%., dengan rerata perkembangannya sebesar -5,74%. Selanjutnya, rerata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada daerah pemekaran sebesar 17,87% dengan rerata perkembangannya sebesar -3,85%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada daerah induk lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontribusi pada daerah pemekaran.

**Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Kontribusi Retribusi terhadap PAD (%)					Rerata Kontribusi (%)	Rerata Perkembangan Kontribusi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	35,05	46,06	39,84	39,36	34,49	38,96	1,09
Merangin	24,72	30,92	41,76	35,61	38,46	34,29	13,35
Bungo	13,94	13,91	5,79	6,09	6,68	9,28	-10,92
Tanjung Jabung Barat	21,47	21,97	13,21	19,20	16,11	18,39	-2,08
Kerinci	41,88	10,32	7,41	9,88	11,67	16,23	-13,02
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>27,41</b>	<b>24,64</b>	<b>21,60</b>	<b>22,03</b>	<b>21,48</b>	<b>23,43</b>	<b>-5,74</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	31,72	35,15	17,12	16,37	15,68	23,21	-12,28
Sarolangun	22,55	27,82	14,83	13,26	21,38	19,97	6,81
Tebo	31,21	27,11	20,34	16,34	20,79	23,16	-7,65
Tanjung Jabung Timur	12,44	11,86	7,40	10,11	10,86	10,53	0,46
Kota Sungai Penuh	10,80	22,36	8,60	10,83	9,83	12,48	15,53
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>21,75</b>	<b>24,86</b>	<b>13,66</b>	<b>13,38</b>	<b>15,71</b>	<b>17,87</b>	<b>-3,85</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 4. menunjukkan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD masih rendah dan berfluktuasi setiap tahunnya, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Rerata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada daerah induk dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 10,48% dengan rerata perkembangannya sebesar 0,42%. Selanjutnya, rerata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada daerah pemekaran sebesar 13,89%, dengan rerata perkembangannya sebesar 0,84%. Bila dilihat secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2009-2013, kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada daerah induk lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi pada daerah pemekaran.

**Tabel 4. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD (%)					Rerata Kontribusi (%)	Rerata Perkembangan Kontribusi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	16,90	14,97	15,24	9,81	9,14	13,21	-13,02
Merangin	12,42	14,01	18,46	12,12	8,01	13,00	-5,91
Bungo	9,81	10,48	13,08	6,13	4,86	8,87	-10,58
Tanjung Jabung Barat	8,46	8,23	7,63	7,74	7,11	7,83	-4,16
Kerinci	0,00	7,69	16,77	9,77	13,13	9,47	36,96
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>9,52</b>	<b>11,08</b>	<b>14,24</b>	<b>9,12</b>	<b>8,45</b>	<b>10,48</b>	<b>0,42</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	14,67	13,25	13,84	8,04	5,29	11,02	-20,33
Sarolangun	17,51	18,48	19,38	11,82	10,29	15,50	-10,38
Tebo	18,09	25,53	26,87	20,74	8,16	19,88	-9,28
Tanjung Jabung Timur	12,81	12,75	22,45	16,96	14,77	15,95	9,57
Kota Sungai Penuh	0,00	0,00	0,07	11,20	24,16	7,09	5009,97
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>12,62</b>	<b>14,00</b>	<b>16,52</b>	<b>13,75</b>	<b>12,54</b>	<b>13,89</b>	<b>0,84</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD berfluktuasi setiap tahunnya, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Rerata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD pada daerah induk dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 47,49% dengan perkembangannya sebesar 0,43%. Selanjutnya, rerata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD pada daerah pemekaran sebesar 45,23% dengan perkembangannya sebesar -3,07%. Bila dilihat secara keseluruhan, kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap penerimaan PAD pada daerah induk lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pada daerah pemekaran.

**Tabel 5. Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Terhadap PAD (%)					Rerata Kontribusi (%)	Rerata Perkembangan Kontribusi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	29,81	19,63	23,36	29,73	30,64	26,63	3,80
Merangin	47,90	37,13	21,45	26,66	26,03	31,83	-10,70
Bungo	61,94	62,45	65,58	71,78	65,58	65,47	1,66
Tanjung Jabung Barat	55,48	55,28	58,34	55,17	54,62	55,78	0,31
Kerinci	37,43	66,69	64,49	61,10	59,01	57,75	16,55
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>46,51</b>	<b>48,24</b>	<b>46,65</b>	<b>48,89</b>	<b>47,18</b>	<b>47,49</b>	<b>0,43</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	33,85	26,25	28,57	32,21	34,57	31,09	1,61
Sarolangun	43,15	34,30	50,30	49,26	35,88	42,58	-0,78
Tebo	31,05	27,15	25,60	38,85	49,62	34,45	15,31
Tanjung Jabung Timur	64,28	66,34	58,60	51,92	46,22	57,47	-7,71
Kota Sungai Penuh	77,91	48,95	71,75	56,63	47,60	60,57	-6,90
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>50,05</b>	<b>40,60</b>	<b>46,96</b>	<b>45,77</b>	<b>42,78</b>	<b>45,23</b>	<b>-3,07</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

**Kemampuan Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Dalam Menggali Sumber-Sumber PAD untuk Membiayai Belanja Daerah.**

PAD merupakan faktor penunjang utama dalam merealisasikan pembangunan di Provinsi Jambi, baik di kabupaten/kota induk maupun pemekaran. Sumber-sumber PAD ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk digali semaksimal mungkin. Pemerintah Daerah harus berupaya optimal untuk meningkatkan PAD pada setiap tahun anggaran. Kontribusi PAD memiliki peranan dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Tabel 6 berikut ini menyajikan data kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013.

**Tabel 6. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah (%)					Rerata Kontribusi (%)	Rerata Perkembangan Kontribusi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	3,72	4,32	5,76	4,84	5,27	4,78	10,58
Merangin	4,88	4,45	5,57	3,87	5,06	4,76	4,18
Bungo	7,28	7,63	9,35	8,85	8,30	8,28	3,93
Tanjung Jabung Barat	3,38	3,42	5,55	5,18	4,98	4,50	13,23
Kerinci	4,55	5,82	5,36	4,44	4,80	4,99	2,73
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>4,76</b>	<b>5,13</b>	<b>6,32</b>	<b>5,44</b>	<b>5,68</b>	<b>5,47</b>	<b>5,36</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	2,80	3,00	4,41	4,60	4,67	3,90	14,93
Sarolangun	3,74	3,86	4,98	3,86	4,24	4,14	4,85
Tebo	3,75	3,11	3,64	4,33	4,59	3,88	6,21
Tanjung Jabung Timur	3,15	3,15	3,52	3,62	3,26	3,34	1,20
Kota Sungai Penuh	1,91	2,79	3,61	4,24	4,34	3,38	23,93
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>3,07</b>	<b>3,18</b>	<b>4,03</b>	<b>4,13</b>	<b>4,22</b>	<b>3,73</b>	<b>8,74</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 6. menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah berfluktuasi setiap tahunnya, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Pada daerah induk, rerata kontribusi PAD terhadap belanja daerah dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 5,47%, dengan perkembangan kontribusinya adalah sebesar 5,36%. Selanjutnya, pada daerah pemekaran rerata kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 3,73%, dengan perkembangan kontribusinya sebesar -8,74%. Bila dilihat secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada daerah induk lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pada daerah pemekaran.

Secara umum, kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama Tahun 2009-2013 masih sangat rendah, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Rendahnya kontribusi PAD dalam anggaran daerah tidak terlepas dari sistem *tax assignment* di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti PBB P3, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk. Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlalu sentralistik.

Rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah juga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum efektif. Selama ini pungutan pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang ini, Pemerintah Daerah masih diberi kelonggaran untuk memungut pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terkait retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip penetapan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kelonggaran pungutan pajak dan retribusi daerah tersebut malah sulit dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pajak dan retribusi Pemerintah Pusat. Ditemukan berbagai permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.
2. Pengenaan pajak dan/atau retribusi daerah tidak didasarkan pada data potensi objek pajak dan/atau retribusi daerah.
3. Kekurangan penetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
4. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
5. Perannya yang tergolong kecil dalam penerimaan daerah.
6. Pajak daerah dan/atau retribusi daerah belum dipungut.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat sehingga biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat bervariasi.

Selain itu, rendahnya kontribusi PAD dalam pembiayaan daerah juga dikarenakan masih rendahnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Eksistensi BUMD dalam tataran perekonomian daerah dalam prakteknya belum memberikan pengaruh yang signifikan dikarenakan beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan, antara lain lemahnya dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur BUMD, lemahnya pengawasan dan pembinaan BUMD, intervensi dan birokrasi negatif dari pejabat Pemerintah Daerah, dan *mismanagement* karena manajemen BUMD yang tidak profesional.

Begitu pula dengan pendapatan PAD yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset daerah oleh pihak diluar Pemerintah Daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Atas pemanfaatan aset daerah tersebut, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan. Namun pemanfaatan aset daerah oleh pihak diluar Pemerintah Daerah juga masih belum optimal.

Bila dibandingkan dengan daerah pemekaran, kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada daerah induk tetap lebih tinggi. Artinya, kondisi keuangan daerah induk masih lebih baik dibandingkan dengan daerah pemekaran. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketertinggalan daerah pemekaran dari daerah induk. Walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya memperbaiki perekonomian, namun dimasa transisi tetap membutuhkan proses, sehingga belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan. Porsi perekonomian daerah pemekaran yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah induk mengindikasikan bahwa secara relatif daerah pemekaran belum memiliki peran dalam pengembangan perekonomian regional.

Dapat dikatakan pula bahwa daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki masalah ketimpangan fiskal dalam sumber pendanaan dari PAD. Ketimpangan fiskal dalam hal ini berarti daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum mampu mencukupi belanja dan biaya daerahnya melalui sumber PAD secara murni sehingga masih memerlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum mampu menggali sumber-sumber PAD untuk membiayai belanja daerah secara optimal.

**Peran Dana Perimbangan Dalam Membiayai Belanja Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi.**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini timbul karena adanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada hakekatnya selalu berpegang teguh pada asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan yang pada prinsipnya diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Dana yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Dikarenakan kontribusi PAD masih relatif rendah, maka Pemerintah Daerah melalui APBD sangat menggantungkan pembiayaan kegiatan pemerintahan dari penerimaan dana perimbangan ini. Kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 7. Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah					Rerata Kontribusi	Rerata Perkembangan Kontribusi
	2009	2010	2011	2012	2013	(%)	(%)
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	88,82	92,74	85,65	90,57	84,25	88,41	-1,12
Merangin	79,91	86,53	79,19	86,04	86,17	83,57	2,15
Bungo	72,94	78,80	81,48	85,45	73,93	78,52	0,71
Tanjung Jabung Barat	81,54	102,79	106,55	101,61	87,43	95,98	2,78
Kerinci	97,81	85,81	76,44	81,95	85,53	85,51	-2,90
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>84,20</b>	<b>89,33</b>	<b>85,86</b>	<b>89,12</b>	<b>83,46</b>	<b>86,40</b>	<b>-0,09</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	85,43	88,58	88,53	92,16	77,40	86,42	-2,07
Sarolangun	72,56	96,71	83,07	88,92	94,71	87,19	8,18
Tebo	80,82	79,53	91,91	92,90	88,60	86,75	2,60
Tanjung Jabung Timur	76,01	93,42	83,38	88,39	88,64	85,97	4,61
Kota Sungai Penuh	97,76	110,41	95,61	86,28	81,43	94,30	-3,96
<b>Rerata Kontribusi</b>	<b>82,51</b>	<b>93,73</b>	<b>88,50</b>	<b>89,73</b>	<b>86,15</b>	<b>88,13</b>	<b>1,35</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2009-2013 cukup tinggi, baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran. Rerata kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pada daerah induk dalam periode Tahun 2009-2013 adalah sebesar 86,40%, dengan rerata perkembangan kontribusi sebesar -0,09%. Selanjutnya, pada daerah pemekaran rerata kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah sebesar 88,13%, dengan rerata perkembangan kontribusi sebesar 1,35%.

Bila dilihat secara keseluruhan, kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pada daerah induk lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pada daerah pemekaran. Tingginya kontribusi dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki peran yang sangat vital dalam ketersediaan dana untuk menjalankan roda pemerintahan. kabupaten/kota di Provinsi Jambi, baik daerah induk maupun daerah pemekaran selama ini masih sangat bergantung pada bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013), jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui DBH dan meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah melalui DAU dan DAK, masih menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya alokasi dana penyesuaian tertentu yang belum sepenuhnya berdasarkan formula dan kriteria. Selain itu, adanya dana perimbangan belum mampu mewujudkan pembangunan daerah secara merata.

### **Alokasi Belanja Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8. Alokasi Belanja Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

Kabupaten/ Kota	Alokasi Belanja Daerah (Juta Rupiah)					Rerata Alokasi (Juta Rupiah)	Rerata Perk. Alokasi (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>DAERAH INDUK</b>							
Batanghari	492.160	514.797	619.870	769.064	960.488	671.276	18,49
Merangin	570.607	569.528	712.131	777.677	876.739	701.336	11,70
Bungo	569.152	600.884	649.382	726.099	966.224	702.348	14,63
Tanjung Jabung Barat	641.316	637.080	731.332	861.412	1.096.364	793.501	14,80
Kerinci	457.216	524.217	651.638	720.505	759.675	622.650	13,74
<b>Rerata Alokasi</b>	<b>546.090</b>	<b>569.301</b>	<b>672.871</b>	<b>770.951</b>	<b>931.898</b>	<b>698.222</b>	<b>14,47</b>
<b>DAERAH PEMEKARAN</b>							
Muaro Jambi	528.098	560.489	640.596	791.793	1.039.739	712.143	18,84
Sarolangun	556.199	490.049	634.977	725.385	738.950	629.112	8,45
Tebo	484.388	513.341	536.206	622.138	748.554	580.925	11,69
Tanjung Jabung Timur	610.934	633.096	699.652	813.064	913.243	733.998	10,67
Kota Sungai Penuh	97.145	297.157	397.258	464.215	558.831	362.921	69,20
<b>Rerata Alokasi</b>	<b>455.353</b>	<b>498.826</b>	<b>581.738</b>	<b>683.319</b>	<b>799.863</b>	<b>603.820</b>	<b>15,17</b>

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 8 menunjukkan bahwa secara umum alokasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada daerah induk, hanya Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang alokasi belanja daerahnya mengalami penurunan di Tahun 2010, namun ditahun-tahun berikutnya alokasi belanja daerah terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada daerah pemekaran, alokasi belanja daerah Kabupaten

Sarolangun sempat mengalami penurunan di Tahun 2010, namun alokasi belanja daerah mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Rerata perkembangan alokasi belanja daerah pada daerah induk dalam kurun waktu 2009-2013 adalah sebesar 14,47%, sedangkan rerata perkembangan alokasi belanja daerah pada daerah pemekaran dalam kurun waktu 2009-2013 adalah sebesar 15,17%. Sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi belanja daerah pada daerah induk lebih rendah dibandingkan dengan alokasi belanja daerah pada daerah pemekaran.

### **Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi**

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, metode estimasi yang paling baik digunakan adalah metode FEM, baik pada daerah induk maupun daerah pemekaran. maka hasil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Regresi Data Panel Metode FEM (Daerah Induk)**

Dependent Variable: BD?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 5				
Total pool (balanced) observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29105.66	81466.42	-0.357272	0.7256
PAD?	5.300419	1.598256	3.316376	0.0044
DBH?	-0.010486	0.193093	-0.054305	0.9574
DAU?	1.058121	0.292980	3.611577	0.0023
DAK?	3.420276	2.012943	1.699142	0.1086
Fixed Effects (Cross)				
_BTH--C	7894.976			
_MER--C	-65531.65			
_BUN--C	-158601.0			
_TJB--C	319645.4			
_KER--C	-103407.7			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.945642	Mean dependent var		698222.3
Adjusted R-squared	0.918463	S.D. dependent var		160262.4
S.E. of regression	45762.56	Akaike info criterion		24.57403
Sum squared resid	3.35E+10	Schwarz criterion		25.01283
Log likelihood	-298.1754	Hannan-Quinn criter.		24.69574
F-statistic	34.79289	Durbin-Watson stat		1.656620
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas F-statistik (*p\_value*) sebesar 0,000000  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan), terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji t, secara parsial PAD

dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,9185. Hal ini berarti bahwa 91,85% belanja daerah di daerah induk dipengaruhi oleh PAD dan DAU, sedangkan sisanya yaitu 8,15% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

**Tabel 10. Hasil Regresi Data Panel Metode FEM (Daerah Pemekaran)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	113550.8	35454.73	3.202699	0.0055
PAD?	7.779377	1.912843	4.066919	0.0009
DBH?	0.157104	0.122525	1.282222	0.2180
DAU?	0.748548	0.222732	3.360751	0.0040
DAK?	0.112368	0.570492	0.196966	0.8463
Fixed Effects (Cross)				
_MJB--C	12080.25			
_SAR--C	-29976.95			
_TEB--C	-46553.00			
_TJT--C	145273.0			
_SPN--C	-80823.35			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.981721	Mean dependent var	603819.9	
Adjusted R-squared	0.972582	S.D. dependent var	193262.5	
S.E. of regression	32001.15	Akaike info criterion	23.85864	
Sum squared resid	1.64E+10	Schwarz criterion	24.29744	
Log likelihood	-289.2331	Hannan-Quinn criter.	23.98035	
F-statistic	107.4171	Durbin-Watson stat	2.209250	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas F-statistik ( $p\_value$ ) sebesar  $0,000000 \leq 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan), terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji t, secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,9726. Hal ini berarti bahwa 97,26% belanja daerah di daerah induk dipengaruhi oleh PAD dan DAU, sedangkan sisanya yaitu 2,74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

### **Analisis Fenomena *Flypaper Effect* pada Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi**

Analisis *flypaper effect* yang dapat disimpulkan adalah bahwa meskipun kedua variabel bebas (PAD dan DAU) secara signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (Belanja Daerah), namun PAD ternyata lebih berpengaruh dibandingkan DAU dimana nilai koefisien regresi variabel PAD lebih besar dibandingkan nilai koefisien regresi variabel DAU. Pada daerah induk, nilai koefisien regresi dari PAD sebesar 5,300419; sedangkan nilai koefisien dari DAU sebesar 1,058121. Begitu pula pada daerah pemekaran, nilai koefisien regresi dari PAD sebesar 7,779377; sedangkan nilai koefisien dari DAU sebesar 0,748548. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Jambi. Artinya kebijakan Belanja Daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2009–2013 lebih didominasi oleh PAD dibandingkan dengan DAU. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Nunuy dan Halida (2013) dimana tidak terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Belanja kabupaten/kota di Provinsi Banten pada Tahun 2006-2012.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Kontribusi sumber-sumber PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada daerah induk maupun daerah pemekaran masih tergolong rendah.
2. Daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum mampu menggali sumber-sumber PAD untuk membiayai belanja daerah secara optimal.
3. Tingginya kontribusi dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki peran yang sangat vital dalam ketersediaan dana untuk menjalankan roda pemerintahan.
4. Alokasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Namun alokasi belanja daerah untuk belanja operasi masih lebih tinggi dibandingkan belanja modal.
5. Pada daerah induk, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan pada daerah pemekaran, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, DBH dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
6. Tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah, baik pada kabupaten/kota induk maupun kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi.

#### **Saran**

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, baik daerah induk maupun daerah pemekaran harus lebih kreatif dalam mencari dan meningkatkan PAD. Upaya yang bisa dilakukan adalah analisis secara mendalam terhadap sumber-sumber PAD. Upaya yang dapat dilakukan antara lain intensifikasi, yaitu dengan meningkatkan penerimaan yang sudah ada, dan ekstensifikasi, yaitu memperluas sumber-sumber pendapatan yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Dalam menggali sumber-sumber PAD ini, bisa menggunakan empat prinsip umum perpajakan, yaitu *efficiency*, *equity*, *neutrality* dan *administrative feasibility*. Keempat prinsip ini penting untuk menjadi dasar dalam membuat peraturan-

peraturan daerah yang bertujuan menarik pendapatan secara ekonomi dari masyarakat. Dalam implementasinya, keempat prinsip ini juga perlu dilakukan secara berimbang sehingga tidak memunculkan konflik kepentingan baru dalam pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan penghasilan daerah.

2. Dana perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat berupa DBH, DAU dan DAK harus benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
3. Kualitas belanja daerah dalam APBD selama ini dianggap masih lemah, yang ditandai dengan indikasi belanja operasi yang selalu lebih tinggi daripada belanja modal. Proporsi alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana layanan publik masih rendah dalam struktur APBD jika dibandingkan dengan alokasi untuk belanja pegawai sehingga kinerja *spending performances* dalam mendanai pelayanan publik masih belum optimal dan efektif. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, baik di daerah induk maupun daerah pemekaran perlu memprioritaskan alokasi belanja untuk program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah, dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Nunuy Nur, Halida Arsyi. (2013). Pengaruh DAU, dan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada kabupaten/kota di Provinsi Banten. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. VII No.2 hal.12-27
- Amir. A, Junaidi, Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.
- Amril, Erfit, Safri, M. (2015). *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2 Nomor 3, Januari-Maret 2015.
- Bappenas. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta: BRIDGE.
- Baskaran, T. (2012). *The Flypaper Effect : Evidence from A Natural Experiment in Hesse* (pp. 1–25). Goettingen, Germany.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- Devita. A, Delis. A, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2. Nomor 2, Oktober-Desember 2014.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS.
- Falleti, T. G. (2005). A Sequential Theory of Decentralization : Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 99, 327 – 346.
- Gamkhar, S., & Oates, W. (1996). Asymmetries in The Response to Increases and Decreases in Intergovernmental Grants: Some Empirical Findings. *National Tax Journal*. 49(4), 501–512.

- Gennari, E., & Messina, G. (2009). *How Sticky are Local Expenditures in Italy ? Assesing The Relevance of The “Flypaper Effect” Through Municipal Data* (No. 844) (pp. 1–31). Italy.
- Gorodnichenko, Y. (2001). *Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine*, Master Thesis, University of Kiev, <http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2001/pdf/gorodnichenko.df>
- Gounder, N., Narayan, P. K., & Prasad, A. (2007). An Empirical Investigation of the Relationship Between Government Revenue and Expenditure: The Case of The Fiji Islands. *International Journal of Social Economics*, 34(3), 147–158. doi:10.1108/03068290710726711.
- Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *The American Economic Review*, Vol.35, No.4. (Sep., 1945), pp. 519-530.
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226. doi:10.1257/jep.9.4.217.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. (1994). Intertemporal Analysis of state in local governemnt spending: Theory and test. *Journal Of Urban Economics* 35: 159-174.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori & Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Junaidi, J. (2014). Regresi dengan Microsoft Office Excel. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Haryo. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9.
- Kuncoro, Haryo. (2007). “Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. *Symposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kurnia, E.D., (2013). *Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada kabupaten/kota di Jawa Timur)*. Malang: Unibraw.
- Kusumadewi, Dyah Ayu dan Rahman, Arief, (2007), *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada kabupaten/kota Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 11 Nomor 1, Juni 2007.
- Lee, L. (2012). The Flypaper and Teflon Effects: Evidence from China. *Modern Economy*, 03(07), 811–816. doi:10.4236/me.2012.37103.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. (2001). Non-linear and asymetrics adjustment in the local revenue –expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan. *Working paper*.
- Maimunah, Mutiara, (2006), *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra, *Symposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Mardiasmo, (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masdjojo, G.N., Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap B elanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect*

- kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen (TEMA)*. Vol.6 Edisi 1 Maret 2009 Hal.32-50.
- Oates, Wallace E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*. Vol. XXXVII (September 1999) pp. 1120–1149
- Oktavia, Deni. (2014). *Flypaper Effect: Fenomena Serail Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol.12 No.2 Desember 2014*.
- Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pramuka, Bambang Agus. (2010). *Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.11 No.1 Juni 2010.
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Sidik, Machfud. (2001). *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Sidang Pleno X ISEI*. Batam, Indonesia: ISEI.
- Sour,L., & Giron,F. (2009). *Eletoral Competition and the Flypaper Effect in Mexican Local Governments* (No. 238). Mexico.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarmi, Saptaningsih. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta*”. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2010. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Syukriy, Abdullah., & Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi STEI*. No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Tiebout,C.M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*. Vol.64, No.5, (Oct., 1956), pp. 416-424.
- Triwidodo, Pambudi. (2007). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

- Yefirson. (2015). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekarannya di Provinsi Sumatera Barat* (Tesis). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Yustika, Ahmad Erani. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.